

Bawaslu DIY Supervisi Pengawasan Pleno PDPB Triwulan III Tahun 2026 di Lima Kabupaten/Kota



Foto: Ketua Bawaslu DIY melaksanakan supervisi pengawasan rapat pleno terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 di KPU Kota Yogyakarta

Yogyakarta — Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melaksanakan supervisi pengawasan rapat pleno terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 di lima kabupaten/kota se-DIY. Supervisi dilakukan untuk memastikan proses pemutakhiran dan rekapitulasi data pemilih berjalan sesuai dengan ketentuan serta hasil pengawasan Bawaslu ditindaklanjuti oleh jajaran KPU.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026 di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada Rabu, 30 September 2026. Dalam pelaksanaannya, pimpinan Bawaslu DIY melakukan supervisi pengawasan di masing-masing wilayah.

Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib melakukan supervisi pengawasan di Kota Yogyakarta. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu

DIY Umi Illiyina melakukan supervisi di Kabupaten Sleman. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Sutrisnowati melakukan supervisi di Kabupaten Kulon Progo.

Supervisi di Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Agung Nugroho, sedangkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bayu Mardinta Kurniawan melakukan supervisi di Kabupaten Bantul.

2,96 Juta Pemilih Tercatat dalam PDPB Triwulan III

Berdasarkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026, jumlah pemilih berkelanjutan di DIY tercatat sebanyak 2.962.276 pemilih. Jumlah tersebut tersebar di 78 wilayah setingkat kecamatan dan 438 wilayah setingkat desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.442.932 pemilih atau 48,7 persen merupakan laki-laki, sedangkan 1.519.344 pemilih atau 51,3 persen merupakan perempuan.

Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan jumlah pemilih berkelanjutan terbanyak, yakni 884.921 pemilih. Selanjutnya, Kabupaten Bantul tercatat sebanyak 769.583 pemilih, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 628.188 pemilih, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 351.821 pemilih, dan Kota Yogyakarta sebanyak 327.763 pemilih.

Perubahan Data Pemilih

Rekapitulasi PDPB Triwulan III juga mencatat sejumlah perubahan data pemilih di empat kabupaten/kota. Di Kabupaten Bantul, terdapat 7.130 pemilih baru, 5.047 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan 5.248 perbaikan data.

Kabupaten Sleman mencatat 10.253 pemilih baru, 5.648 pemilih TMS, dan 7.569 perbaikan data. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul mencatat 4.597 pemilih baru, 3.926 pemilih TMS, dan 4.522 perbaikan data.

Di Kota Yogyakarta terdapat 4.501 pemilih baru, 4.118 pemilih TMS, dan 2.743 perbaikan data. Adapun untuk Kabupaten Kulon Progo, rincian jumlah pemilih baru, TMS, dan perbaikan data tidak dilampirkan dalam berita acara rekapitulasi.

Bawaslu Kawal Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu kabupaten/kota menyampaikan saran dan masukan kepada KPU sebagai bagian dari upaya memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir.

Di Kota Yogyakarta, Bawaslu menyampaikan saran perbaikan terhadap 116 data, yang terdiri atas 84 data TMS dan 32 data Memenuhi Syarat (MS). Dari jumlah tersebut, 89 data telah ditindaklanjuti, satu data telah masuk dalam PDPB Triwulan II, sedangkan 26 data tidak dapat ditindaklanjuti, antara lain karena NIK tidak terdapat dalam Sidalih atau merupakan NIK luar Kota Yogyakarta.

Di Kabupaten Bantul, saran dan masukan hasil pengawasan Bawaslu telah ditindaklanjuti dalam penetapan rekapitulasi. Tindak lanjut tersebut dilakukan bersama dengan masukan dari Rutan Kelas IIB Bantul serta hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kodim 0729, dan Polres Bantul.

Sementara itu, di Kabupaten Sleman, saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu terhadap 62 orang telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Di Kabupaten Kulon Progo, Bawaslu menyampaikan saran terhadap 46 data. Sebanyak 44 data telah ditindaklanjuti pada Triwulan III, termasuk 34 data yang sama dengan data dari KPU RI. Adapun dua data tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak dilengkapi dokumen pendukung yang autentik.

Di Kabupaten Gunungkidul, saran Bawaslu telah ditindaklanjuti dengan menetapkan 31 data sebagai TMS karena meninggal dunia dan 21 data sebagai pemilih baru. Selain itu, masukan dari Kodim 0730 sebanyak tiga data dan Polres sebanyak tujuh data juga ditetapkan sebagai pemilih baru.

Pengawasan Berkelanjutan

Supervisi pengawasan yang dilakukan Bawaslu DIY merupakan bagian dari upaya memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan secara akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain mengawasi proses rekapitulasi, Bawaslu juga memastikan saran perbaikan hasil pengawasan mendapatkan tindak lanjut dari KPU. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pengawasan PDPB tidak berhenti pada proses rekapitulasi, tetapi juga mencakup pencermatan terhadap perubahan data, pemenuhan syarat sebagai pemilih, serta tindak lanjut atas hasil pengawasan yang disampaikan kepada penyelenggara pemilu.

Foto: Heri

Editor: Humas Bawaslu DIY